

## KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAKWAH DI ERA TEKNOLOGI

**Risqiatul Hasanah<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Irfan Noor<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN ANTASARI Banjarmasin

[risqiatulhasanah@uin-antasari.ac.id](mailto:risqiatulhasanah@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>, [muhammadiqbal@uin-antasari.ac.id](mailto:muhammadiqbal@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>,

[irfannoor@uin-antasari.ac.id](mailto:irfannoor@uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak :** Komersialisasi pendidikan telah menjadi salah satu isu yang semakin penting di tengah perkembangan globalisasi dan revolusi teknologi. Di Indonesia, pendidikan yang sebelumnya dipandang sebagai hak dasar dan layanan publik kini semakin sering diubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dengan motif keuntungan. Di Islam sendiri, pendidikan merupakan bagian dari metode dakwah, sehingga hal yang terkait dengan pendidikan tentunya berdampak pada dakwah itu sendiri. Fenomena ini diperkuat oleh kemajuan teknologi digital yang menawarkan berbagai inovasi dalam sektor pendidikan, seperti pembelajaran online, platform digital, dan penggunaan kecerdasan buatan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar dalam meningkatkan akses pendidikan, namun di sisi lain, mempercepat komersialisasi yang berdampak pada meningkatnya ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Artikel ini mengeksplorasi berbagai aspek dari komersialisasi pendidikan dalam konteks revolusi teknologi, termasuk faktor-faktor yang mendorong tren ini, dampak terhadap kualitas dan kesetaraan pendidikan, serta tantangan etis yang muncul ketika pendidikan beralih dari fungsi sosialnya menuju entitas bisnis. Dengan menggunakan pendekatan kritis, artikel ini juga mengkaji bagaimana komersialisasi pendidikan menciptakan tekanan terhadap keluarga, memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, serta menurunkan nilai-nilai sosial pendidikan. Lebih lanjut, artikel ini membahas peran teknologi dalam mempercepat proses komersialisasi, sekaligus menawarkan solusi untuk menjaga agar pendidikan tetap inklusif dan berkeadilan. Melalui kajian ini, diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya kebijakan pendidikan yang adil dan berbasis hak, sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Artikel ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi yang menekankan perlunya regulasi yang ketat terhadap sektor swasta dalam pendidikan, peningkatan peran negara dalam penyediaan layanan pendidikan publik, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan akses pendidikan yang merata dan terjangkau.

**Kata Kunci:** Dakwah, Komersialisasi Pendidikan, Revolusi Teknologi, Akses Pendidikan, Kesetaraan, Kebijakan Pendidikan.

**Abstract :** Commercialization of education has become an increasingly important issue in the midst of globalization and technological revolution. In Indonesia, education that was previously seen as a basic right and public service is now increasingly being turned into a commodity that is traded for profit. In Islam itself, education is part of the da'wah method, so matters related to education certainly have an impact on da'wah itself. This phenomenon is reinforced by advances in digital technology that offer various innovations in the education sector, such as online learning, digital platforms, and the use of artificial intelligence. On the one hand, technology opens up great

opportunities in improving access to education, but on the other hand, it accelerates commercialization, which has an impact on increasing inequality in access to quality education. This article explores various aspects of the commercialization of education in the context of the technological revolution, including the factors driving this trend, the impact on the quality and equity of education, and the ethical challenges that arise when education moves from its social function to a business entity. Using a critical approach, the article also examines how the commercialization of education creates pressure on families, widens the gap between the rich and poor, and undermines the social value of education. Furthermore, this article discusses the role of technology in accelerating the commercialization process, while offering solutions to keep education inclusive and equitable. Through this study, it is hoped that awareness of the importance of fair and rights-based education policies will be raised, so that education can be accessed by all levels of society without discrimination. The article concludes with a series of recommendations that emphasize the need for strict regulation of the private sector in education, an increased role for the state in the provision of public education services, and the use of technology to create equitable and affordable access to education.

Keywords: Da'wah, Commercialization of Education, Technological Revolution, Access to Education, Equity, Education Policy.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak era kemerdekaan hingga saat ini<sup>1</sup>. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya gejala komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan semakin dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Komersialisasi pendidikan membawa implikasi yang kompleks, baik dari segi aksesibilitas, kualitas, hingga dampaknya terhadap keadilan sosial<sup>2</sup>.

Dakwah sendiri mengalami komersialisasi saat dai menargetkan tarif di setiap kegiatan dakwahnya. Pun demikian pendidikan sebagai salah satu strategi dalam berdakwah. Komersialisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses di mana pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu, berubah menjadi layanan atau barang yang diperdagangkan dengan motif keuntungan. Dalam konteks ini, institusi pendidikan, baik formal maupun informal, berperan sebagai penyedia jasa yang menawarkan produk pendidikan dengan harga tertentu<sup>3</sup>. Hal ini mencakup peningkatan biaya sekolah, kursus privat yang mahal, hingga fenomena sekolah-sekolah elit yang hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu.

Secara lebih luas, komersialisasi pendidikan juga berkaitan dengan masuknya prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya, lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk menarik siswa berdasarkan daya jual mereka, seperti fasilitas mewah, prestise, atau jaminan kelulusan

---

<sup>1</sup> Elisya Permata Sari, Eny Maria, and Annafi' Franz, "Sistem Pakar Bimbingan Dan Konseling Terhadap Perilaku Siswa Menggunakan Metode Backward Chaining Berbasis Web," *Buletin Poltanesa* 20, no. 1 (June 1, 2019): 11–19, <https://doi.org/10.51967/TANESA.V20I1.313>.

<sup>2</sup> Mahifal Wahyudin, "The Relevance of Civil Education in the Era of Globalization in Indonesia," *SSRN Electronic Journal*, January 1, 2011, <https://doi.org/10.2139/SSRN.1793060>.

<sup>3</sup> M. Afandi, "PERSEPSI SISWA TENTANG KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DAN INTENSITAS BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA".

yang cepat<sup>4</sup>. Akibatnya, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembentukan karakter dan kompetensi yang merata bagi seluruh masyarakat, tetapi lebih sebagai produk eksklusif yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Sejarah singkat komersialisasi pendidikan di Indonesia yaitu ketika pendidikan di Indonesia mengalami perubahan paradigma sejak era Orde Baru, di mana pemerintah mulai mengintegrasikan pendekatan ekonomi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan<sup>5</sup>. Pada masa itu, pendidikan dipandang sebagai investasi dalam sumber daya manusia, yang dianggap penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara.<sup>6</sup> Konsep ini membawa perubahan besar, terutama dengan diperkenalkannya sekolah-sekolah swasta dan perguruan tinggi yang lebih mengedepankan biaya yang lebih tinggi namun menawarkan "kualitas" pendidikan yang lebih baik.

Dalam dua dekade terakhir, komersialisasi pendidikan semakin terasa, terutama dengan dibukanya peluang besar bagi investor untuk berinvestasi dalam sektor pendidikan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta muncul dengan menawarkan program-program khusus yang berbiaya tinggi. Sementara itu, di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, biaya sekolah semakin mahal dengan berbagai pungutan, seperti uang gedung, uang kegiatan, hingga uang seragam yang tidak jarang memberatkan orang tua<sup>7</sup>.

Konteks pendidikan di Indonesia dalam komersialisasi pendidikan telah menjadi isu yang semakin mengemuka seiring dengan perkembangan neoliberalisme dan masuknya nilai-nilai ekonomi pasar dalam sektor pendidikan. Komersialisasi ini terjadi ketika pendidikan dipandang bukan lagi sebagai hak dasar warga negara, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan<sup>8</sup>. Hal ini menciptakan potensi ketimpangan yang serius dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok sosial-ekonomi yang kurang mampu.

Kutipan dari "The Oxford Handbook of Philosophy of Education", kurikulum pendidikan sering kali dirancang untuk melanggengkan ideologi dominan dan menjaga kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari berkembangnya institusi pendidikan swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan premium, tetapi dengan biaya yang sangat tinggi<sup>9</sup>. Sekolah-sekolah dan universitas swasta sering kali menjadi pilihan utama bagi kelompok masyarakat yang mampu, sementara sekolah negeri, yang seharusnya menjadi tumpuan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengalami keterbatasan anggaran dan sumber

---

<sup>4</sup> A. Halik, "MENCARI FORMAT PENDIDIKAN ANAK YANG IDEAL (Kritik Terhadap Konsep Full-Day School)".

<sup>5</sup> H. Kurnia and H. Hudaidah, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966)".

<sup>6</sup> E. K. Lestari, S. Wibisono and D. Sa'bandianto, "Pengaruh Besaran Perekonomian, Tingkat Upah dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018".

<sup>7</sup> N. I. Sukirno and A. Damayanti, "Dampak Pendidikan Terhadap Produktivitas dan Upah: Bukti Empiris Pasar Monopsoni di Industri Manufaktur Indonesia".

<sup>8</sup> N. Hamidah and S. Indartono, "The Policy of Commercialization Abolition in Indonesia Equality Education Effort: The Explanation of the Coleman's Report".

<sup>9</sup> C. Situmeang and M. R. Habibi, "Governance Based on Cost Analysis (Unit Cost Analysis for Vocational Schools)".

daya.

Akibat dari fenomena di atas, kelompok sosial-ekonomi bawah semakin terpinggirkan dari akses terhadap pendidikan berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung masuk ke sekolah-sekolah dengan fasilitas dan kualitas yang lebih rendah, sementara anak-anak dari keluarga kaya dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih baik, seperti sekolah internasional atau perguruan tinggi dengan program kelas dunia yang berbiaya tinggi<sup>10</sup>. Ini memperkuat ketimpangan sosial dan reproduksi struktur kelas di masyarakat.

Selain itu, komersialisasi pendidikan juga berdampak pada orientasi pendidikan itu sendiri. Alih-alih fokus pada pengembangan karakter dan pemahaman kritis, pendidikan semakin diarahkan pada tujuan-tujuan ekonomi, seperti mempersiapkan siswa untuk pasar tenaga kerja yang kompetitif. Institusi pendidikan berlomba-lomba menawarkan program-program yang "menjual" dengan janji memberikan kesuksesan karier dan keuntungan finansial di masa depan. Namun, hal ini sering kali mengorbankan misi pendidikan yang lebih luas, yaitu menciptakan warga negara yang berpendidikan baik dan memiliki kemampuan berpikir kritis.

Dalam praktiknya, komersialisasi pendidikan di Indonesia juga terlihat melalui fenomena peningkatan biaya pendidikan, baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai pungutan, seperti uang gedung, uang seragam, dan biaya lainnya, sering kali menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Situasi ini tidak hanya membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, tetapi juga memicu siklus kemiskinan yang sulit diputus<sup>11</sup>. Sementara dalam Islam kemiskinan lebih dekat kepada kekafiran, siklus seperti lingkaran setan ini tidak akan terputus mata rantainya jika praktik komersialisasi pendidikan terus berpacu melawan tujuan dakwah itu sendiri.

Di era revolusi teknologi, komersialisasi semakin diperparah dengan munculnya platform pendidikan digital yang berorientasi bisnis. Meskipun teknologi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan akses pendidikan, layanan pendidikan digital sering kali berbayar dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Hal ini semakin memperparah kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil.

Menghadapi tantangan ini, perlu adanya intervensi kebijakan yang memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Negara harus meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta mencegah sektor swasta mendominasi penyediaan layanan pendidikan dengan orientasi bisnis semata<sup>12</sup>. Pendidikan bukanlah komoditas yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, tetapi hak asasi

---

<sup>10</sup> I. P. Ika, "Analisis Pengelompokan Data Argumen Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Pendaftaran Sekolah Dengan Menggunakan Metode Clustering".

<sup>11</sup> K. Masjhur and N. Karnati, "Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar".

<sup>12</sup> N. I. Sukirno and A. Damayanti, "Dampak Pendidikan Terhadap Produktivitas dan Upah: Bukti Empiris Pasar Monopsoni di Industri Manufaktur Indonesia".

manusia yang harus dijamin untuk semua warga negara.

Pendidikan merupakan hak dasar yang diakui oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan Konstitusi Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat, pendidikan mengalami pergeseran dari sistem yang berbasis nilai sosial menuju komodifikasi. Pergeseran ini melahirkan apa yang disebut dengan komersialisasi pendidikan, sebuah fenomena di mana pendidikan tidak lagi dipandang semata sebagai sarana pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi turut memicu perubahan yang signifikan dalam cara pendidikan diselenggarakan, diakses, dan dikelola<sup>13</sup>.

Revolusi teknologi membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan. Munculnya platform digital dan teknologi pembelajaran online menciptakan peluang baru bagi pendidikan. Namun, bersamaan dengan itu, tantangan juga muncul. Pendidikan mulai didorong oleh kepentingan ekonomi, di mana institusi pendidikan berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini memunculkan dilema etis tentang tujuan utama pendidikan: apakah masih berfokus pada pengembangan individu dan masyarakat, ataukah bergeser menjadi bisnis yang mengutamakan profit?

Artikel ini bertujuan untuk menavigasi bagaimana komersialisasi pendidikan terjadi di tengah revolusi teknologi, mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan sehingga tujuan dakwah tercapai yakni menciptakan *insan kamil*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Library Research** atau penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti mengandalkan sumber-sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan atau platform digital, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya. Pendekatan ini penulis gunakan bertujuan untuk menggali informasi teoritis, membandingkan pandangan yang berbeda, atau memahami perkembangan suatu fenomena pendidikan kekinian berdasarkan literatur yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Komersialisasi Pendidikan: Sebuah Fenomena Global

Komersialisasi pendidikan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, pendidikan semakin dipandang sebagai industri yang menguntungkan. Lembaga-lembaga pendidikan swasta dan

---

<sup>13</sup> B. W. B. Warsita, "Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran".

internasional bermunculan, menawarkan program-program yang menjanjikan kesuksesan karir dan masa depan cerah dengan biaya yang sangat tinggi. Fenomena ini didorong oleh beberapa faktor utama:

### **A.1. Privatisasi dan Liberalisasi Pendidikan**

Privatisasi pendidikan adalah salah satu faktor pendorong utama komersialisasi. Dalam banyak kasus, pemerintah tidak mampu memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap pendidikan berkualitas, sehingga membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. Di Indonesia, privatisasi pendidikan semakin berkembang, terutama dengan maraknya sekolah-sekolah swasta dan perguruan tinggi yang dikelola oleh entitas bisnis. Liberalisasi kebijakan pendidikan juga memberikan ruang bagi pemain asing untuk memasuki pasar pendidikan nasional, menciptakan kompetisi yang semakin ketat.

### **A.2. Tekanan Globalisasi**

Globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi sistem pendidikan. Dengan semakin tingginya mobilitas manusia dan informasi, pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di pasar global. Hal ini memaksa institusi pendidikan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka, yang sering kali berarti peningkatan biaya pendidikan. Akibatnya, pendidikan yang berkualitas menjadi semakin sulit diakses oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

### **A.3. Pergeseran Nilai Pendidikan**

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai yang mendasari pendidikan juga mengalami perubahan. Jika pada masa lalu pendidikan dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, saat ini pendidikan mulai dipandang sebagai investasi individu. Orang tua dan siswa bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pendidikan yang diyakini dapat memberikan keuntungan ekonomi di masa depan<sup>14</sup>. Fenomena ini mengarah pada peningkatan biaya pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Faktor Pendorong Komersialisasi Pendidikan yang *pertama*, Kurangnya Anggaran Pendidikan. Salah satu faktor utama yang mendorong komersialisasi pendidikan adalah Pemerintah, dalam banyak kasus, tidak mampu sepenuhnya membiayai kebutuhan pendidikan, terutama di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks<sup>15</sup>. Akibatnya, sektor swasta mulai mengambil peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan pendidikan.

Kurangnya anggaran pendidikan juga memperparah kondisi ini. Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat, seringkali dana tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Situasi ini memaksa sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui komersialisasi layanan pendidikan mereka.

*Kedua*, Kompetisi Internasional. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai sarana lokal untuk

---

<sup>14</sup> A. Aminuddin, A. S. Harahap and M. N. Dawi, "Sistem Finansial Pendidikan di Indonesia (Analisis Tentang Signifikansinya Terhadap Pengelolaan Human Capital)".

<sup>15</sup> L. N. Mufidah, "AKTUALISASI TQM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM".

membangun sumber daya manusia, tetapi sebagai alat kompetisi di panggung global<sup>16</sup>. Sekolah-sekolah dan universitas bersaing untuk mencetak lulusan yang dapat bersaing secara internasional, yang seringkali memerlukan biaya tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti kurikulum internasional, fasilitas modern, dan pengajar berkualitas.

Di Indonesia, tren ini terlihat jelas dengan munculnya sekolah-sekolah internasional dan universitas swasta yang menawarkan program gelar internasional. Lulusan dari institusi ini diharapkan memiliki kemampuan lebih baik untuk bersaing di pasar tenaga kerja global, meskipun biaya pendidikan di tempat-tempat tersebut sangat mahal<sup>17</sup>.

*Ketiga*, Tuntutan Pasar Kerja dan Pendidikan Berbasis Kompetensi. Pasar kerja yang semakin kompetitif juga mendorong terjadinya komersialisasi pendidikan. Banyak orang tua dan siswa bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pendidikan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi dan sekolah-sekolah pun merespons dengan menawarkan program-program pendidikan berbasis kompetensi yang lebih mahal, dengan janji bahwa lulusannya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau gaji yang lebih tinggi<sup>18</sup>.

*Keempat*, Teknologi dan Inovasi Pendidikan. Meningkatnya peran teknologi dalam pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong komersialisasi. Penggunaan teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, dan alat-alat digital lainnya seringkali memerlukan biaya tambahan<sup>19</sup>. Institusi pendidikan yang menerapkan teknologi canggih seringkali menawarkan program pendidikan dengan biaya lebih tinggi, dengan alasan bahwa investasi tersebut diperlukan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

## **B. Revolusi Teknologi dalam Pendidikan**

Revolusi teknologi, terutama dengan munculnya internet dan teknologi digital, telah mengubah wajah pendidikan secara fundamental. Teknologi pendidikan mencakup berbagai inovasi seperti pembelajaran online, aplikasi pendidikan, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan big data<sup>20</sup>. Teknologi ini tidak hanya mempengaruhi cara pembelajaran dilakukan, tetapi juga membuka peluang bagi komersialisasi pendidikan.

### **B.1. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akses Pendidikan**

Salah satu dampak positif dari teknologi adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Platform pembelajaran online seperti Massive Open Online Courses (MOOCs) memungkinkan siapa pun

---

<sup>16</sup> A. Kholik and S. Laeli, "Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Sekolah Alam Berbasis Model Resource-Based View".

<sup>17</sup> G. C. Ananda, Z. Ramadhan, B. Suwarno and B. Alamsyah, "Socialization Of The International Certified Internship Program In Support Of The Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Policy At The Faculty Of Teacher Training And Education, Santo Thomas Catholic University, Medan".

<sup>18</sup> S. Novieyana, E. Sofiana and T. Wahyuarini, "EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN POLA PENDIDIKAN SISTEM GANDA PADA SEKOLAH KEJURUAN DI KOTA PONTIANAK".

<sup>19</sup> Z. Zen, "INOVASI PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI : MENUJU PENDIDIKAN MASA DEPAN".

<sup>20</sup> M. H. Basyaev, N. A. A. Diens and M. F. K. Suwandi, "Implementasi Pembelajaran dengan Teknologi Video Based Learning".

dengan akses internet untuk mendapatkan pendidikan dari institusi-institusi terbaik di dunia. Di Indonesia, platform-platform seperti Ruangguru, Zenius, dan Quipper juga telah memperluas akses pendidikan bagi siswa di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Teknologi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan geografis dan memberikan peluang pendidikan yang lebih merata<sup>21</sup>.

### **B.2. Pendidikan Berbasis Data dan Kecerdasan Buatan**

Penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan membuka peluang baru dalam personalisasi pembelajaran. Melalui analisis big data, sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa<sup>22</sup>. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, karena siswa mendapatkan materi dan metode pengajaran yang paling sesuai dengan profil belajar mereka. Namun, teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data dan potensi bias dalam algoritma yang digunakan.

### **B.3. Teknologi dan Komersialisasi Pendidikan**

Di balik semua manfaat yang ditawarkan teknologi, revolusi teknologi juga mempercepat komersialisasi pendidikan. Banyak platform pembelajaran online yang memonetisasi layanan mereka melalui model langganan, iklan, atau penjualan konten premium. Sementara itu, institusi pendidikan juga menggunakan teknologi untuk menawarkan program-program pendidikan jarak jauh yang berbiaya tinggi<sup>23</sup>. Di satu sisi, teknologi membuka akses pendidikan, tetapi di sisi lain, komersialisasi teknologi pendidikan dapat memperparah ketidaksetaraan akses, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

## **C. Kajian Teoritis: Komersialisasi Pendidikan di Tengah Revolusi Teknologi**

Kajian teoritis terkait komersialisasi pendidikan dan dampaknya di tengah revolusi teknologi dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif utama. Perspektif ini mencakup teori ekonomi pendidikan, teori ketidaksetaraan dalam pendidikan, serta teori tentang peran teknologi dalam perubahan sosial<sup>24</sup>. Pada bagian ini, akan dijelaskan bagaimana komersialisasi pendidikan diartikulasikan dalam konteks revolusi teknologi, serta bagaimana kerangka teoritis ini relevan untuk memahami transformasi yang terjadi di sektor pendidikan.

### **C. 1. Teori Ekonomi Pendidikan**

Teori ekonomi pendidikan mengemukakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan modal manusia (human capital), yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan

---

<sup>21</sup> L. M. S. Sudeni, P. K. Nitiasih and L. G. R. Budiarta, "Developing Authentic Assessment Rubric for Assessing 5th Grade Elementary School Students at Buleleng Regency".

<sup>22</sup> R. Mawardati, N. Fahrada, M. Mahmudi and S. Rahmatina, "Penggunaan Interactive Handout Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Materi Kerucut dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Siswa Kelas IX SMP/IK Nurul Quran Aceh".

<sup>23</sup> H. Hardiansyah, N. Kamil and U. S. A.S., "Pengembangan Media Belajar Mobile Learning pada Pembelajaran IPA di Masa Pandemi Covid 19".

<sup>24</sup> R. W. Ilham, "Perkembangan Teknologi Dibidang Pendidikan".

ekonomi suatu negara. Becker (1964), melalui konsep modal manusia, menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas individu, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan output ekonomi<sup>25</sup>. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai investasi yang harus dikelola secara efisien untuk mendapatkan return yang optimal.

Namun, dalam teori ekonomi pendidikan juga diakui bahwa pendidikan dapat menjadi komoditas dalam sistem pasar yang didorong oleh permintaan dan penawaran. Teori ini sering digunakan untuk mendukung kebijakan pendidikan berbasis pasar, yang membuka ruang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan<sup>26</sup>. Akibatnya, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai barang komersial yang dapat diperjualbelikan. Pergeseran paradigma ini mengarah pada komersialisasi pendidikan, di mana institusi pendidikan bersaing untuk menarik "pelanggan" (siswa) dan menawarkan layanan yang sering kali berbiaya tinggi.

Dalam konteks revolusi teknologi, teori ini semakin relevan. Teknologi digital memberikan peluang baru bagi penyedia pendidikan untuk menawarkan layanan mereka kepada audiens yang lebih luas, sering kali melalui platform komersial seperti kursus online berbayar, langganan aplikasi pendidikan, dan program sertifikasi yang mahal. Pendidikan mulai bergerak menuju model bisnis, di mana institusi harus berinovasi dan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar<sup>27</sup>.

### **C. 2. Teori Ketidaksetaraan dalam Pendidikan**

Teori ketidaksetaraan pendidikan, yang dikembangkan oleh sosiolog seperti Pierre Bourdieu (1973), memberikan kerangka untuk memahami bagaimana akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi individu. Dalam teorinya tentang *Habitus and Kapital*, Bourdieu menyoroti bagaimana kelompok-kelompok tertentu, terutama dari kelas ekonomi atas, memiliki lebih banyak akses ke sumber daya pendidikan yang lebih baik, termasuk fasilitas, kurikulum, dan guru yang berkualitas<sup>28</sup>.

Komersialisasi pendidikan memperparah ketidaksetaraan ini. Dengan meningkatnya biaya pendidikan, akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin. Di satu sisi, pendidikan dipromosikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, tetapi di sisi lain, biaya pendidikan yang tinggi justru menghalangi kelompok kurang mampu untuk mengakses peluang tersebut<sup>29</sup>. Ketidaksetaraan ini diperburuk oleh teknologi, di mana penggunaan alat-alat pembelajaran digital, seperti laptop, akses internet, dan aplikasi pendidikan berbayar, menjadi prasyarat untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

---

<sup>25</sup> G. S. Becker, "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis".

<sup>26</sup> B. Ibrahim, "MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERSAINGAN MUTU".

<sup>27</sup> Kurniali, "AN APPROACH TO ONLINE LEARNING USING LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION".

<sup>28</sup> A. Idi, Y. T. Samiha and R. Romadhon, "Madrasah dan Mobilitas Sosial".

<sup>29</sup> S. Sukardi, W. Wildan and A. Sukri, "Pendidikan Bagi Masyarakat Kategori Marginal Kawasan Pariwisata: Aplikasi Pendidikan Berbasis Praktik Sosial".

Teori ketidaksetaraan pendidikan ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia, di mana hanya kelompok-kelompok yang lebih mampu secara finansial yang dapat mengakses sekolah-sekolah swasta dan universitas berkelas internasional, sementara kelompok kurang mampu terjebak dalam sistem pendidikan yang sering kali kurang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pengajaran.

### **C. 3. Teori Teknologi dan Perubahan Sosial**

Teori teknologi dan perubahan sosial menekankan bahwa teknologi memiliki peran signifikan dalam mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat<sup>30</sup>. Menurut Manuel Castells (1996), teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, menjadi faktor utama yang mengubah cara kerja ekonomi global dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Castells menyoroti bahwa teknologi digital berperan dalam menciptakan era jaringan global, di mana individu, institusi, dan negara-negara terhubung dalam ekosistem global yang saling bergantung.

Dalam konteks pendidikan, teknologi digital telah membawa perubahan besar. Proses pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring melalui platform seperti Massive Open Online Courses (MOOCs), kelas virtual, dan e-learning. Teknologi memungkinkan pendidikan untuk menjadi lebih fleksibel dan diakses oleh lebih banyak orang. Namun, teori ini juga mengakui adanya ketimpangan teknologi (digital divide), di mana akses terhadap teknologi pendidikan tidak merata di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat<sup>31</sup>.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mempercepat proses komersialisasi. Institusi pendidikan, yang sebelumnya beroperasi secara fisik, kini menggunakan teknologi untuk menawarkan layanan mereka secara global, menciptakan pasar baru yang kompetitif<sup>32</sup>. Di sisi lain, teknologi mempermudah institusi untuk menerapkan model bisnis baru yang berorientasi pada keuntungan, seperti program pendidikan jarak jauh yang berbiaya mahal dan penggunaan perangkat lunak pendidikan berlisensi.

### **C. 4. Teori Pendidikan sebagai Hak Asasi**

Teori pendidikan sebagai hak asasi menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966). Menurut teori ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang gratis, berkualitas,

---

<sup>30</sup> M. Usman, J. Jumiati and F. Julianti, "Efektivitas Penggunaan Mobile Learning Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa".

<sup>31</sup> I. Cahyanto, "Privacy Challenges in Using Wearable Technology in Education Literature Review".

<sup>32</sup> O. M. Anwas, "Pembudayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sekolah".

dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau geografis<sup>33</sup>.

Dalam konteks komersialisasi pendidikan, teori ini menantang pendekatan pasar yang mengubah pendidikan menjadi komoditas<sup>34</sup>. Teori pendidikan sebagai hak asasi berpendapat bahwa ketika pendidikan diperdagangkan dengan motif keuntungan, hal tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Pendidikan yang seharusnya inklusif dan berkeadilan, berubah menjadi produk eksklusif yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Revolusi teknologi, meskipun memberikan peluang baru, juga memunculkan tantangan terhadap teori ini<sup>35</sup>. Teknologi sering kali digunakan untuk menciptakan layanan pendidikan yang mahal dan eksklusif, yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi semua, bukan hanya untuk memperkaya institusi pendidikan yang berorientasi pada keuntungan.

#### **D. Implikasi Teoretis dalam Konteks Indonesia**

Teori-teori di atas sangat relevan untuk memahami dinamika komersialisasi pendidikan yang terjadi saat ini. Privatisasi pendidikan, ketidaksetaraan akses, dan dominasi teknologi dalam sektor pendidikan menjadi isu-isu utama yang dihadapi. Peningkatan jumlah institusi pendidikan swasta, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, memperlihatkan tren komersialisasi yang semakin kuat. Biaya pendidikan yang terus meningkat menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, sementara teknologi, meskipun memberikan peluang baru, sering kali hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai<sup>36</sup>.

Dalam kerangka teori ekonomi pendidikan, pendidikan di Indonesia bergerak menuju model yang lebih berbasis pasar, di mana persaingan antar lembaga pendidikan meningkat, dan siswa dipandang sebagai konsumen. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya pendidikan yang membebani orang tua dan siswa. Di sisi lain, teori ketidaksetaraan pendidikan menjelaskan bagaimana kelompok masyarakat kurang mampu semakin sulit mengakses pendidikan berkualitas, yang diperburuk oleh revolusi teknologi yang menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya digital<sup>37</sup>.

Sementara itu, teori pendidikan sebagai hak asasi memberikan dasar argumentasi bagi kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks komersialisasi pendidikan, teori ini menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh

---

<sup>33</sup> P. Losina and R. E. Izzaty, "Access and equity in higher education in Indonesia: a review from the periphery".

<sup>34</sup> A. Wijastuti, S. Masitoh, I. K. Ainin and F. Ardianingsih, "Critical Analysis of the Inclusive Education Implementation in the Concept of Freedom of the Soul and Zona Proximal Development".

<sup>35</sup> N. F. Yuliani, S. Mania, D. Magfirah, F. Nur and S. Suharti, "Pengembangan Instrumen Tes untuk Mengukur Kemampuan Problem Solving Siswa pada Materi Aritmatika Sosial".

<sup>36</sup> I. P. Ramdayana, H. Prasetyono and A. T. Sutoyo, "IMPLEMENTASI METODE DEMOSTRASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMPN SATU ATAP 5 SAJIRA KABUPATEN LEBAK".

<sup>37</sup> E. R. Hutami, "KENDALA PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI BAGI SISWA SD, GURU, DAN ORANGTUA".

semua warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan pendidikan di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini agar pendidikan tidak menjadi hak eksklusif bagi kelompok tertentu, tetapi tetap inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat<sup>38</sup>.

## **E. Dampak Komersialisasi Pendidikan**

Komersialisasi pendidikan, terutama dalam konteks revolusi teknologi, memiliki dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek pendidikan. Dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa area utama, yaitu kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan kesetaraan.

### **E.1. Dampak terhadap Kualitas Pendidikan**

Komersialisasi pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan, terutama melalui peningkatan persaingan di antara institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang komersial cenderung berinovasi untuk menarik siswa, baik melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan fasilitas, maupun teknologi pembelajaran yang canggih. Namun, peningkatan kualitas ini tidak selalu menjamin hasil yang baik bagi seluruh siswa<sup>39</sup>. Dalam banyak kasus, pendidikan yang lebih mahal justru menekankan pada aspek komersial dibandingkan kualitas akademik yang mendalam.

### **E.2. Ketimpangan Akses Pendidikan**

Dampak negatif utama dari komersialisasi pendidikan adalah ketimpangan akses. Pendidikan yang mahal hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Di Indonesia, ketimpangan akses ini terlihat jelas antara sekolah-sekolah swasta elit yang berfasilitas lengkap dengan sekolah-sekolah negeri yang sering kali kekurangan sumber daya.

Salah satu dampak paling mencolok dari komersialisasi pendidikan adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan. Ketika pendidikan diperdagangkan, hanya mereka yang mampu secara finansial yang dapat mengakses layanan pendidikan berkualitas. Hal ini memperlebar kesenjangan sosial, di mana anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa memilih pendidikan yang lebih murah dan kurang berkualitas, sementara anak-anak dari keluarga kaya dapat mengakses sekolah-sekolah elit dengan fasilitas dan sumber daya yang lebih baik.

### **E.3. Dampak Sosial dan Psikologis**

Komersialisasi pendidikan juga memiliki dampak sosial dan psikologis, terutama bagi siswa dan keluarga. Tekanan untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan biaya tinggi dapat menyebabkan stres dan kecemasan, baik bagi orang tua maupun siswa. Di sisi lain, siswa yang tidak mampu mengakses

---

<sup>38</sup> A. W. E. Mulyadi, "Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia".

<sup>39</sup> T. N. Sari, M. Koto and R. D. Marviana, "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN YANG BERPENGARUH TERHADAP NILAI PELANGGAN PADA BISNIS JASA PENDIDIKAN TINGGI".

pendidikan berkualitas sering kali merasa terpinggirkan dan mengalami penurunan rasa percaya diri<sup>40</sup>.

Komesialisasi pendidikan juga memberikan tekanan finansial yang besar pada keluarga, terutama keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah. Biaya sekolah yang semakin mahal, ditambah dengan berbagai pungutan lainnya, sering kali membuat orang tua harus bekerja lebih keras atau mengorbankan kebutuhan lainnya demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Tekanan ini sering kali berdampak pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, dan dalam beberapa kasus, dapat mengakibatkan anak-anak putus sekolah.

#### ***E.4. Pendidikan sebagai Komoditas, Bukan Hak Asasi***

Komesialisasi pendidikan juga mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak asasi setiap warga negara, berubah menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka<sup>41</sup>.

#### ***E.5. Menurunnya Kualitas Pendidikan di Lembaga Publik***

Ketika sektor swasta menawarkan pendidikan dengan biaya tinggi dan fasilitas yang lebih baik, lembaga pendidikan publik sering kali mengalami penurunan kualitas. Hal ini disebabkan oleh alokasi dana yang terbatas, kurangnya sumber daya, serta ketidakmampuan untuk bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang lebih kaya. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang seharusnya menjadi tulang punggung pendidikan bagi masyarakat luas, malah terpinggirkan dan seringkali dianggap sebagai pilihan kedua bagi orang tua yang tidak mampu membayar pendidikan swasta.

### **F. Kebijakan Pendidikan di Era Komersialisasi dan Teknologi**

Untuk mengatasi dampak negatif komersialisasi pendidikan, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini harus bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif, merata, dan berkeadilan, tanpa mengorbankan kualitas pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global<sup>42</sup>.

#### ***F.1. Peningkatan Peran Negara dalam Pendidikan***

Negara harus tetap mengambil peran utama dalam penyediaan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan dasar hingga menengah tetap gratis dan berkualitas, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah negeri<sup>43</sup>. Selain itu,

---

<sup>40</sup> M. Mukholil, "KECEMASAN DALAM PROSES BELAJAR".

<sup>41</sup> S. Sihombing, "HUBUNGAN STATUS SOSIAL ORANGTUA DAN FASILITAS BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 1 PEMATANGSIANTAR TAHUN AJARAN 2018/2019".

<sup>42</sup> F. Elwijaya, V. Mairina and N. Gistituati, "Konsep dasar kebijakan pendidikan".

<sup>43</sup> S. N. Asyiah, M. F. Adnan and A. Mubarak, "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN".

kebijakan afirmatif juga harus diterapkan untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi.

### **F.2. Regulasi terhadap Pendidikan Swasta**

Pendidikan swasta, meskipun memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan, perlu diatur dengan baik untuk mencegah komersialisasi yang berlebihan. Pemerintah perlu menetapkan standar yang ketat terkait biaya pendidikan, transparansi keuangan, dan kualitas layanan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta. Selain itu, regulasi juga harus mencakup perlindungan hak-hak siswa, termasuk dalam hal akses terhadap beasiswa dan subsidi pendidikan<sup>44</sup>.

### **F.3. Pengembangan Teknologi Pendidikan yang Inklusif**

Teknologi pendidikan harus dikembangkan dengan prinsip inklusivitas, di mana teknologi tersebut dapat diakses oleh semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka<sup>45</sup>. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dengan sektor teknologi untuk menciptakan platform pembelajaran yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, regulasi yang ketat juga harus diterapkan terkait penggunaan data pribadi siswa dalam teknologi pendidikan, untuk melindungi privasi mereka.

### **F.4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Negeri**

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri juga menjadi solusi penting dalam mengatasi komersialisasi pendidikan. Sekolah-sekolah negeri harus diberikan dukungan berupa fasilitas, pelatihan guru, serta sumber daya lainnya agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah swasta<sup>46</sup>. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas dalam memilih lembaga pendidikan.

## **H. Komersialisasi Pendidikan Perspektif Islam**

Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai kewajiban moral dan hak setiap individu, sehingga praktik yang mengeksploitasi pendidikan untuk keuntungan pribadi bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Salah satu ayat yang relevan untuk menentang komersialisasi pendidikan Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

<sup>44</sup> R. Hapipah, "PENGARUH KURANGNYA FASILITAS BELAJAR MENGAJAR UNTUK SISWA DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN".

<sup>45</sup> I. Mayangsari, U. H. Salsabila, I. Tari, I. R. Zulaikha and F. A. Dewi, "Pendidikan Teknologi di Sekolah Inklusi".

<sup>46</sup> N. B. Kurniawati and P. Pardimin, "Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar".

*memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Ayat ini melarang praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil atau dengan merugikan orang lain. Komersialisasi pendidikan, terutama jika mempersulit akses pendidikan bagi yang kurang mampu dan memprioritaskan keuntungan di atas hak pendidikan, bisa dikaitkan dengan larangan dalam ayat ini. Pendidikan seharusnya bukan sarana untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan dengan membebani pihak lain, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup bersama dan menyebarkan ilmu pengetahuan secara adil dan merata.

Salah satu hadis yang relevan dengan larangan komersialisasi pendidikan, terutama terkait dengan pentingnya memberikan ilmu secara ikhlas dan tidak mencari keuntungan materi semata, Hadis Riwayat Abu Dawud, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

Artinya: *"Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dikekang dengan kekangan dari api neraka."*

(HR. Abu Dawud, No. 3664, At-Tirmidzi, No. 2649)

Hadis ini menekankan pentingnya menyampaikan ilmu dan tidak menahannya karena alasan apapun, termasuk mencari keuntungan materi atau memonopoli ilmu untuk kepentingan pribadi. Ini selaras dengan larangan komersialisasi pendidikan, di mana ilmu seharusnya diberikan secara terbuka dan inklusif, bukan diperdagangkan secara eksklusif untuk keuntungan ekonomi semata. Pendidikan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan bermanfaat bagi semua orang tanpa diskriminasi.

## KESIMPULAN

Kajian teoritis tentang komersialisasi pendidikan di tengah revolusi teknologi menunjukkan adanya transformasi besar dalam cara pendidikan diselenggarakan dan diakses. Pendekatan berbasis pasar dalam pendidikan telah menciptakan ketidaksetaraan akses, di mana pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat kurang mampu. Teknologi, meskipun memberikan peluang baru, juga mempercepat proses komersialisasi dan menciptakan tantangan baru dalam hal keadilan akses. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak bagi semua, bukan komoditas yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang.

Komersialisasi pendidikan di tengah revolusi teknologi merupakan tantangan besar bagi sistem pendidikan di Indonesia yang tentunya berimplikasi pada strategi dakwah di bidang pendidikan yang bertujuan menciptakan *insan kamil*. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, tetapi di sisi lain, komersialisasi yang tidak terkontrol dapat memperparah ketidaksetaraan dan mengurangi nilai-nilai dasar pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang

komprehensif dan berpihak pada keadilan sosial untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak bagi semua orang, bukan sekadar komoditas bisnis.

### SARAN

Berikut ini adalah saran yang bisa didapatkan dari keseluruhan artikel ini, antara lain:

1. Peningkatan Peran Negara: Pemerintah harus memastikan pendidikan tetap menjadi hak dasar dengan meningkatkan anggaran pendidikan, khususnya untuk kelompok kurang mampu.
2. Regulasi Komersialisasi: Perlunya regulasi ketat terhadap institusi pendidikan swasta dan teknologi pendidikan berbayar untuk mencegah eksploitasi yang memperburuk ketimpangan akses.
3. Pemanfaatan Teknologi yang Inklusif: Teknologi pendidikan harus dikembangkan untuk memperluas akses secara merata, termasuk ke daerah terpencil dan masyarakat marjinal.

### REFERENSI

- E. P. Sari, E. Maria and A. Franz, "Sistem Pakar Bimbingan dan Konseling Terhadap Perilaku Siswa Menggunakan Metode Backward Chaining Berbasis Web".
- M. Mahipal, "The Relevance of Civil Education in the Era of Globalization in Indonesia".
- M. Afandi, "PERSEPSI SISWA TENTANG KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DAN INTENSITAS BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA".
- A. Halik, "MENCARI FORMAT PENDIDIKAN ANAK YANG IDEAL (Kritik Terhadap Konsep Full-Day School)".
- H. Kurnia and H. Hudaidah, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966)".
- E. K. Lestari, S. Wibisono and D. Sa'bandianto, "Pengaruh Besaran Perekonomian, Tingkat Upah dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018".
- N. I. Sukirno and A. Damayanti, "Dampak Pendidikan Terhadap Produktivitas dan Upah: Bukti Empiris Pasar Monopsoni di Industri Manufaktur Indonesia".
- N. Hamidah and S. Indartono, "The Policy of Commercialization Abolition in Indonesia Equality Education Effort: The Explanation of the Coleman's Report".
- C. Situmeang and M. R. Habibi, "Governance Based on Cost Analysis (Unit Cost Analysis for Vocational Schools)".
- I. P. Ika, "Analisis Pengelompokan Data Argumen Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Pendaftaran Sekolah Dengan Menggunakan Metode Clustering".
- K. Masjhur and N. Karnati, "Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar".
- B. W. B. Warsita, "Landasan Teori Dan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran".

- A. Aminuddin, A. S. Harahap and M. N. Dawi, "Sistem Finansial Pendidikan di Indonesia (Analisis Tentang Signifikansinya Terhadap Pengelolaan Human Capital)".
- L. N. Mufidah, "AKTUALISASI TQM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM".
- A. Kholik and S. Laeli, "Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Sekolah Alam Berbasis Model Resource-Based View".
- G. C. Ananda, Z. Ramadhan, B. Suwarno and B. Alamsyah, "Socialization Of The International Certified Internship Program In Support Of The Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Policy At The Faculty Of Teacher Training And Education, Santo Thomas Catholic University, Medan".
- S. Novieyana, E. Sofiana and T. Wahyuarini, "EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN POLA PENDIDIKAN SISTEM GANDA PADA SEKOLAH KEJURUAN DI KOTA PONTIANAK".
- Z. Zen, "INOVASI PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI : MENUJU PENDIDIKAN MASA DEPAN".
- M. H. Basyaev, N. A. A. Diens and M. F. K. Suwandi, "Implementasi Pembelajaran dengan Teknologi Video Based Learning".
- L. M. S. Sudeni, P. K. Nitiasih and L. G. R. Budiarta, "Developing Authentic Assessment Rubric for Assessing 5th Grade Elementary School Students at Buleleng Regency".
- R. Mawardati, N. Fahrädina, M. Mahmudi and S. Rahmatina, "Penggunaan Interactive Handout Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Materi Kerucut dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Siswa Kelas IX SMPiK Nurul Quran Aceh".
- H. Hardiansyah, N. Kamil and U. S. A.S., "Pengembangan Media Belajar Mobile Learning pada Pembelajaran IPA di Masa Pandemi Covid 19".
- R. W. Ilham, "Perkembangan Teknologi Dibidang Pendidikan".
- G. S. Becker, "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis".
- B. Ibrohim, "MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERSAINGAN MUTU".
- Kurniali, "AN APPROACH TO ONLINE LEARNING USING LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION".
- A. Idi, Y. T. Samiha and R. Romadhon, "Madrasah dan Mobilitas Sosial".
- S. Sukardi, W. Wildan and A. Sukri, "Pendidikan Bagi Masyarakat Kategori Marginal Kawasan Pariwisata: Aplikasi Pendidikan Berbasis Praktik Sosial".
- M. Usman, J. Jumiati and F. Julianti, "Efektivitas Penggunaan Mobile Learning Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa".
- I. Cahyanto, "Privacy Challenges in Using Wearable Technology in Education Literature Review".
- O. M. Anwas, "Pembudayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sekolah".

- P. Losina and R. E. Izzaty, "Access and equity in higher education in Indonesia: a review from the periphery".
- A. Wijiastuti, S. Masitoh, I. K. Ainin and F. Ardianingsih, "Critical Analysis of the Inclusive Education Implementation in the Concept of Freedom of the Soul and Zona Proximal Development".
- N. F. Yuliani, S. Mania, D. Magfirah, F. Nur and S. Suharti, "Pengembangan Instrumen Tes untuk Mengukur Kemampuan Problem Solving Siswa pada Materi Aritmatika Sosial".
- I. P. Ramdayana, H. Prasetyono and A. T. Sutoyo, "IMPLEMENTASI METODE DEMOSTRASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMPN SATU ATAP 5 SAJIRA KABUPATEN LEBAK".
- E. R. Hutami, "KENDALA PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI BAGI SISWA SD, GURU, DAN ORANGTUA".
- A. W. E. Mulyadi, "Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia".
- T. N. Sari, M. Koto and R. D. Marviana, "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN YANG BERPENGARUH TERHADAP NILAI PELANGGAN PADA BISNIS JASA PENDIDIKAN TINGGI".
- M. Mukholil, "KECEMASAN DALAM PROSES BELAJAR".
- S. Sihombing, "HUBUNGAN STATUS SOSIAL ORANGTUA DAN FASILITAS BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI 1 PEMATANGSIANTAR TAHUN AJARAN 2018/2019".
- F. Elwijaya, V. Mairina and N. Gistituati, "Konsep dasar kebijakan pendidikan".
- S. N. Asyiah, M. F. Adnan and A. Mubarak, "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PASAMAN".
- R. Hapipah, "PENGARUH KURANGNYA FASILITAS BELAJAR MENGAJAR UNTUK SISWA DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN".
- I. Mayangsari, U. H. Salsabila, I. Tari, I. R. Zulaikha and F. A. Dewi, "Pendidikan Teknologi di Sekolah Inklusi".
- N. B. Kurniawati and P. Pardimin, "Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar".